

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat

Shiva Maira*, Yuliarti

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan konsep *purposive sampling*. Data – data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat di Nagari Muara Kiawai masih tergolong rendah, khususnya dalam aspek pengambilan keputusan dan evaluasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan waktu, serta kurangnya rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan partisipasi yang cukup aktif dalam tahapan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat serta penguatan peran pemerintah nagari dalam memberikan pemahaman dan membuka ruang partisipasi warga secara menyeluruh dalam proses pembangunan, guna menciptakan sinergi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Desa, Pemerintah, Muara Kiawai

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.303>

*Correspondence:: Shiva Maira

Surel: email@e-mail.com

Received: 29-07-2025

Accepted: 29-08-2025

Published: 29-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: *This study aims to describe Community Participation in Development in Nagari Muara Kiawai, Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. The selection of informants in this study uses the concept of purposive sampling. The data obtained were collected through observation, interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the form of community participation in Nagari Muara Kiawai is still relatively low, especially in the aspects of decision-making and evaluation. This is caused by various obstacles such as the low quality of human resources, limited time, and a lack of community responsibility for development. Nevertheless, the community shows quite active participation in the stages of development implementation. This study recommends the need to increase community capacity and strengthen the role of the village government in providing understanding and opening up space for community participation as a whole in the development process, in order to create a balanced synergy between the community and the government.*

Keywords : *Community participation, village development, government, Muara Kiawai*

Pendahuluan

Keberhasilan implementasi otonomi daerah ditentukan oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu merancang sistem pemerintahan yang berjalan secara efektif, efisien, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mampu mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kemampuan pemerintah desa, tetapi juga pada tingkat keterlibatan masyarakat. Seperti dinyatakan oleh Rudiadi et al. (2021), keberhasilan program pembangunan erat kaitannya dengan partisipasi aktif masyarakat. Dalam pembangunan di Indonesia, partisipasi masyarakat menjadi salah satu modal sosial yang penting. Bahkan, kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada adanya masukan dari masyarakat agar lebih sesuai dengan kebutuhan yang ada (Hidayah et al, 2024). Pernyataan tersebut ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam proses perencanaan, dengan tujuan membangun keterpaduan peran antara pemerintah dan warga dalam menyusun kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pemerintah Nagari Muara Kiawai membentuk forum bernama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang berfungsi sebagai wadah untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna membahas isu dan permasalahan pembangunan, menyusun prioritas, dan menyepakati langkah penyelesaiannya (Poespitohadi & Fe, 2023).

Forum musyawarah tahunan ini diselenggarakan untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang mengacu pada RPJM Desa. Dalam proses penyusunan tersebut, seluruh unsur desa, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu dilibatkan agar hasil perencanaan benar-benar mewakili kebutuhan masyarakat, bukan hanya mencerminkan keinginan kelompok elit desa (Poespitohadi & Fe, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat pada perencanaan pembangunan desa adalah hal yang wajib dilakukan karena kehadiran ini penting supaya pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Namun pada kenyataannya, tingkat keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang di Nagari Muara Kiawai masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang tidak menghadiri forum tersebut terutama dari kalangan petani dan pedagang yang lebih memilih untuk memprioritaskan pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih

memprioritaskan kebutuhan ekonomi dasar dibandingkan dengan terlibat dalam forum perencanaan. Selain itu, anggapan bahwa kehadiran mereka tidak akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil juga turut memperkuat sikap apatis masyarakat.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan di forum perencanaan, tetapi juga mencakup tahapan pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi pembangunan (Dwijosusilo & Shafiyah, 2020). Di Nagari Muara Kiawai, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berjalan secara optimal melalui keterlibatan langsung warga dalam berbagai kegiatan, baik melalui pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) maupun pelaksanaan oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN).

Sementara itu, dalam tahap pemanfaatan, masyarakat menggunakan fasilitas yang dibangun, seperti akses jalan, drainase, tembok penahan tebing, dan sebagainya. Namun, muncul keluhan dari masyarakat terkait ketidaktepatan sasaran pembangunan dan belum semua wilayah mendapatkan perhatian yang sama. Beberapa warga menilai bahwa proyek yang diprioritaskan belum sesuai dengan kebutuhan utama mereka. Ketidaksesuaian ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan yang diambil pemerintah, yang dapat terjadi akibat minimnya partisipasi dalam proses perencanaan awal. Selanjutnya tahap evaluasi pembangunan di Nagari Muara Kiawai umumnya dilakukan hanya sekali di akhir tahun dan tidak secara terbuka melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Salah satu contoh desa yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi adalah desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Penelitian yang dilakukan oleh (Dwijosusilo & Shafiyah, 2020) menyebutkan bahwa masyarakat desa Klobur memiliki tingkat keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dari mulai perencanaan hingga evaluasi. Dalam perencanaan, masyarakat aktif memberikan masukan di rapat musrenbang, dan masukkan tersebut dijadikan keputusan bersama. Saat pelaksanaan pembangunan mereka juga berkontribusi secara sukarela melalui tenaga, pemikiran, dan bahkan konsumsi. Setelah pembangunan selesai masyarakat antusias memanfaatkan dan merawat hasil infrastruktur dan ikut serta dalam evaluasi bersama aparat desa. Dengan demikian, desa Klobur menjadi contoh yang baik tentang bagaimana partisipasi masyarakat yang tinggi dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa memang telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar masih berfokus pada partisipasi dalam tahap perencanaan saja dan belum secara menyeluruh mengkaji keempat tahapan partisipasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1977), yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Selain itu, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik menelaah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, khususnya di Nagari Muara Kiawai,

yang menunjukkan rendahnya keterlibatan masyarakat pada tahap pengambilan keputusan, pengambilan manfaat dan evaluasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bentuk serta kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Berdasarkan fenomena rendahnya partisipasi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Nagari Muara Kiawai serta mengidentifikasi kendala-kendala yang memengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, hingga evaluasi, dengan mengacu pada teori partisipasi dari Cohen dan Uphoff (1977).

Metodologi

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif (Moleong, 2017). Lokasi penelitian berada di Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat, yang dipilih berdasarkan pertimbangan adanya beberapa permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian pendahuluan. Penentuan informan dipilih secara *purposive sampling*, yang meliputi Sekretaris Nagari Muara Kiawai, Kepala Urusan Keuangan Nagari Muara Kiawai, dan masyarakat setempat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai pihak terlibat. Analisis data mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Sugiyono (2020), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Nagari Muara Kiawai memegang tanggung jawab untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Pelibatan ini dapat dianalisis melalui pendekatan partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff. Berdasarkan teori tersebut, mendorong keterlibatan masyarakat terlihat melalui berbagai upaya dan kebijakan yang diarahkan untuk membangun kerja sama antara pemerintah dan warga dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pemerintah Nagari Muara Kiawai telah menyediakan ruang bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara rutin setiap bulan November sebelum penyusunan anggaran tahunan. Pemerintah nagari menyediakan 70 undangan untuk di

bagikan ke masyarakat di tiap – tiap jorong, undangan tersebut bertujuan mengajak masyarakat untuk hadir dan menyampaikan usulan terkait rencana pembangunan Nagari. Usulan-usulan tersebut kemudian dibahas bersama secara musyawarah dan disepakati menjadi prioritas dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) nagari.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran masyarakat dalam forum tersebut hanya mencapai 50% dari jumlah undangan. Banyak masyarakat yang tidak dapat hadir karena alasan pekerjaan, keterbatasan waktu, serta terbatasnya informasi mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan. Sebagian warga bahkan mengaku tidak pernah menerima undangan atau pemberitahuan resmi mengenai waktu dan tempat Musrenbang, sehingga mereka tidak mengetahui adanya agenda tersebut. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya penyampaian aspirasi, serta menyebabkan tidak semua kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam proses pembangunan. Pada tahap inilah semestinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat mulai diakomodasi ke dalam rencana pembangunan. Apabila partisipasi di tahap ini belum merata, maka proses pembangunan berisiko tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat, karena tidak semua suara terdengar dan dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan di tingkat nagari.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuniza & Malau, 2024) yang mengatakan bahwa di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan Musrenbang belum maksimal karena keterbatasan akses informasi dan rendahnya kesadaran warga sehingga kegiatan forum perencanaan pembangunan tidak terpapar secara menyeluruh. Selanjutnya (Fauziana, 2024) mengatakan bahwa terhambatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pekerjaan masyarakat yang memakan banyak waktu sehingga membuat masyarakat kurang terlibat dan berpartisipasi secara maksimal dalam kegiatan rencana pembangunan.

Partisipasi dalam pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan di Nagari Muara Kiawai melibatkan masyarakat secara aktif. Pemerintah Nagari memberi ruang kepada masyarakat untuk turut serta menjalankan proyek pembangunan, baik secara individu maupun kolektif. Keterlibatan ini diwujudkan melalui mekanisme yang menyesuaikan dengan besar kecilnya anggaran kegiatan. Apabila anggaran yang tersedia melebihi Rp50 juta, maka dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari warga lokal. Sedangkan untuk kegiatan dengan anggaran di bawah Rp50

juta, pelaksanaan dilakukan langsung oleh Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari (PPKN) tanpa pembentukan tim. Mekanisme ini tidak hanya menunjukkan efisiensi administratif, tetapi juga memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelangsungan proyek pembangunan yang ada di wilayah mereka. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, diketahui bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan melalui ajakan langsung dari pihak nagari maupun perwakilannya.

Partisipasi dalam tahap pelaksanaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Muara Kiawai menjadi bagian aktif dari proses pembangunan Nagari. Konsep ini diperkuat oleh teori Cohen dan Uphoff (1977) yang memandang partisipasi dalam pelaksanaan sebagai wujud nyata peran serta masyarakat secara langsung dalam menjalankan kegiatan pembangunan yang telah dirancang sebelumnya. Keterlibatan tersebut dapat berupa tenaga, waktu, maupun bentuk dukungan lainnya yang memungkinkan program berjalan secara efektif. Dalam konteks ini, masyarakat Muara Kiawai telah berkontribusi dalam mengisi ruang pelaksanaan pembangunan melalui kerja-kerja teknis dan administratif sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Sari Rahmaini (2022) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sinergi antara masyarakat, pemerintah nagari, dan pihak adat serta partisipasi teknis dan administrasi masyarakat terbukti memperkuat pelaksanaan program dan menjaga kesinambungan pengembangan lokal. Dalam konteks Nagari Muara Kiawai, pelibatan melalui TPK dan PPKN sudah menjadi langkah positif, namun tetap penting untuk memperkuat aspek komunikasi dan sosialisasi agar pelaksanaan berjalan dengan lebih inklusif dan merata.

Partisipasi dalam manfaat

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat pembangunan di Nagari Muara Kiawai diwujudkan melalui penggunaan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah Nagari. Setelah pembangunan selesai, pemerintah nagari bersama LPMN turun ke lapangan untuk mengecek langsung apakah fasilitas yang sudah dibangun memang digunakan oleh masyarakat atau tidak. Kegiatan ini bertujuan agar hasilnya tidak terbengkalai dan benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Nagari Muara Kiawai tidak langsung melepas tanggung jawab begitu saja. Berdasarkan temuan dilapangan, masyarakat yang telah mendapatkan fasilitas menggunakan sarana tersebut sesuai dengan fungsinya. Meski demikian, belum semua wilayah mendapatkan perhatian yang sama. Masih ada warga yang merasa belum

ada tindak lanjut dari pemerintah nagari terhadap laporan kerusakan atau ketidaksesuaian fasilitas di lingkungan mereka, yang menandakan bahwa masih ada masyarakat yang belum menerima manfaat pembangunan secara merata. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pada tahap manfaat belum sepenuhnya maksimal.

Sejalan dengan pandangan Cohen dan Uphoff (1977) yang menyebutkan bahwa partisipasi dalam pengambilan manfaat mencerminkan sejauh mana hasil pembangunan dapat benar-benar dinikmati oleh masyarakat. Apabila sebagian masyarakat belum merasakan dampak dari pembangunan secara adil dan merata, maka partisipasi dalam tahap ini belum berjalan secara optimal. Temuan di Nagari Muara Kiawai menunjukkan bahwa meskipun pelibatan sudah dilakukan, distribusi manfaat yang belum merata masih menjadi kendala dalam mewujudkan partisipasi masyarakat sesuai dengan yang digariskan dalam teori tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dzul Fikri dkk. (2023) menjelaskan bahwa meskipun masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan desa, manfaat hasil pembangunan belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat terutama kelompok rentan seperti minoritas dan perempuan.

Partisipasi dalam evaluasi

Pemerintah Nagari Muara Kiawai menyediakan mekanisme evaluasi yang dilaksanakan satu kali dalam setahun, biasanya pada akhir tahun anggaran. Namun, proses evaluasi ini tidak dilakukan melalui forum rapat terbuka yang melibatkan seluruh masyarakat. Pelibatan masyarakat dilakukan secara tidak langsung melalui perwakilan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), yang berjumlah lima orang dan bertugas menyampaikan aspirasi, saran, serta masukan dari warga. Selain perwakilan tersebut, proses evaluasi juga melibatkan pihak Kecamatan, Babinsa (Bintara Pembina Desa), dan Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Evaluasi ini juga dilaksanakan melalui pengecekan langsung ke lapangan oleh pihak – pihak terkait untuk memastikan bahwa pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang telah disusun. Namun, berdasarkan temuan peneliti dilapangan, beberapa masyarakat mengaku belum mengetahui adanya proses evaluasi pembangunan yang melibatkan perwakilan dari LPMN.

Partisipasi dalam tahap evaluasi sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1977) menjelaskan tahap evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan awal atau mengalami penyimpangan, serta mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung hasil pembangunan. Dalam konteks pembangunan di Nagari Muara Kiawai, kegiatan evaluasi pada dasarnya telah dilakukan oleh pemerintah nagari bersama unsur terkait, namun pelibatan

masyarakat masih bersifat terbatas. Warga hanya diwakili oleh perwakilan LPMN, yang keberadaannya belum dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam evaluasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud dalam teori tersebut, karena idealnya keterlibatan masyarakat dilakukan secara lebih luas agar evaluasi pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2024) yang menemukan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam menyusun indikator evaluasi membuat program pengabdian masyarakat jadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Roslinda dkk. (2022) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi program kehutanan sosial masih bersifat perwakilan. Hal ini menyebabkan pengambilan keputusan dalam evaluasi tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi pembangunan di Nagari Muara Kiawai telah dilaksanakan, namun masih bersifat perwakilan dan belum melibatkan masyarakat secara menyeluruh, sehingga hasil evaluasi belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh warga.

Kendala partisipasi masyarakat

Kehadiran masyarakat dalam forum Musrenbang masih tergolong rendah, meskipun undangan telah disebarkan secara merata di tiap jorong. Keterlibatan aktif dalam diskusi dan pengambilan keputusan pun belum merata, karena sebagian besar usulan disampaikan oleh laki-laki, sementara perempuan hanya sekitar 10% hadir dan cenderung pasif karena rasa malu serta kurang percaya diri. Beberapa perempuan menyebutkan bahwa tanggung jawab rumah tangga membatasi keikutsertaan mereka. Chaidir Ali (2023) menjelaskan bahwa partisipasi perempuan dalam Musrenbang tingkat desa di Kota Banda Aceh masih sangat rendah dan cenderung bersifat simbolis. Keterlibatan perempuan terhambat oleh beban domestik, kurang percaya diri, serta kuatnya dominasi laki-laki dalam forum desa.

Bagi sebagian masyarakat, menghadiri forum Musrenbang diartikan sebagai harus mengorbankan pekerjaan atau waktu istirahat, sehingga tidak semua orang bersedia melakukannya. Partisipasi seringkali dijadikan opsi kedua setelah pekerjaan utama mereka, sehingga kehadiran terbatas dan diskusi tidak maksimal. Suindarti dkk. (2020) menyebutkan bahwa pekerjaan harian yang tidak bisa ditinggal menjadi faktor utama rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musrenbang, terutama di desa-desa yang masyarakatnya bergantung pada sektor informal.

Di sisi lain, masyarakat menganggap undangan dari nagari hanya sebagai pemberitahuan formal. Pemerintah nagari dianggap sudah mengetahui kebutuhan daerah karena tinggal di lingkungan yang sama. Mirnawati, dkk. (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa sebagian masyarakat, khususnya perempuan, merasa bahwa kehadiran mereka dalam Musrenbang tidak akan memberi dampak apa-apa terhadap keputusan akhir, karena semua sudah ditentukan oleh elite lokal.

Selanjutnya, pada pelaksanaan di lapangan, muncul penolakan masyarakat, salah satunya adalah pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton di Jorong Sudirman terhenti karena pemilik lahan menolak memberikan izin penggunaan lahannya. Hambatan bukan hanya soal pembebasan lahan, tetapi juga tuntutan kompensasi atas dampak pembangunan—warga lebih menuntut kerugian pribadi tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang. Nuryanti (2023) menyebutkan bahwa konflik pembebasan lahan sering terjadi akibat kurangnya komunikasi awal dan perbedaan persepsi antara pemerintah dan pemilik lahan mengenai besaran kompensasi serta manfaat pembangunan.

Masyarakat sering hanya menggunakan fasilitas yang sudah dibangun tanpa merasa bertanggung jawab untuk menjaganya. Jalan yang mulai kotor atau rusak ringan tak ada yang membersihkan atau memperbaiki, karena ada anggapan fasilitas tersebut hanya untuk digunakan, bukan dirawat. Akibatnya, kerusakan kecil dibiarkan hingga parah dan mengurangi manfaat pembangunan. Suryani (2019) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan pembangunan adalah tidak adanya rasa memiliki, karena masyarakat tidak dilibatkan sejak awal perencanaan. Hal ini membuat mereka merasa fasilitas tersebut adalah milik pemerintah, bukan milik bersama.

Simpulan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Nagari Muara Kiawai telah mencakup seluruh tahapan sesuai dengan teori Cohen dan Uphoff (1977), yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, hingga evaluasi. Pada tahap perencanaan, pemerintah nagari menyelenggarakan Musrenbang setiap tahun dan mengundang masyarakat untuk menyampaikan usulan pembangunan, namun penyampaian informasi ini belum merata sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya Musrenbang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan informasi di forum perencanaan, dan kehadiran masyarakat di sini masih rendah serta partisipasi dalam rapat belum sepenuhnya efektif karena beberapa masyarakat bersikap pasif dalam rapat. Dalam tahap pelaksanaan, masyarakat terlihat cukup aktif dilibatkan, baik secara individu maupun kelompok, tergantung pada ketersediaan dana dan jenis proyek pembangunan yang dilakukan. Pada tahap pengambilan manfaat, masyarakat

menggunakan pembangunan sesuai dengan fungsinya, dan beberapa masyarakat melaporkan apa bila terjadi kerusakan, namun laporan masyarakat belum mendapatkan respon yang cepat dari pemerintah. Sedangkan pada tahap evaluasi, kegiatan dilaksanakan setahun sekali dengan melibatkan unsur perwakilan seperti LPMN, kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, namun belum semua masyarakat mengetahui proses evaluasi tersebut, dan pelibatan yang bersifat perwakilan ini dinilai kurang efektif. Adapun kendala partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten pasaman Barat yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, waktu, dan kurangnya rasa tanggung jawab.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat mengkaji secara lebih mendalam upaya strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di seluruh tahapan pembangunan. Penelitian lanjutan juga dapat mempertimbangkan bentuk komunikasi yang efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa. Secara praktis, diperlukan penyebaran informasi pembangunan yang merata, penyelenggaraan forum evaluasi yang terbuka, serta respons yang cepat terhadap laporan warga. Pemerintah nagari perlu didorong lebih aktif dalam membangun keterlibatan warga, sementara masyarakat juga perlu memiliki kesadaran kolektif untuk menjaga, mengawasi, dan memanfaatkan hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Ali, C. (2023). Keterlibatan Perempuan dalam Musrenbang Tingkat Desa Kota Banda Aceh. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/376358681_KETERLIBATAN_PEREMPUAN_DALAM_MUSRENBANG_TINGKAT_DESA_KOTA_BANDA_ACEH
- Andi, U., Akhwan, A., Ahmad, M., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Jurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Arfita, S., et al. (2023), Collaborative Governance in Nagari Development in Nagari Tigo Balai, Matur District, *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Padang
- Bramantyo, R. Y. (n.d.). Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa. *Transparansi Hukum*, 5(1), 152–167.
- Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 143.
<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v4i2.3068>

- Fikri, D., et al. (2023). Penguatan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(2), DOI: [10.33474/jp2m.v1i2.6558](https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6558)
- Hastuti, D., Agustar, A. & Ifdal. (2023). Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Nagari dan Implikasinya terhadap Partisipasi Masyarakat di Nagari Bisati. *Jurnal Niara*, 16(3), DOI: [10.31849/niara.v16i3.18759](https://doi.org/10.31849/niara.v16i3.18759)
- Hidayah, H., Hasbiyah, S., Studi, P., Publik, A., Tinggi, S., & Amuntai, A. (2024). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa mundar kecamatan lampihong kabupaten balangan*. 101–107.
- Hutagalung, S. S. (2022). *Buku Ajar: Partisipasi dan Pemberdayaan Sektor Publik*.
- Liani, Y., & Takari, D. (2024). *Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022*. 5(11).
- Manghayu, A. (2018). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerapan E-Musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95–115.
- Merry, O. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Talikuran Barat Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Mirnawati, H. & Mukhlis. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Musrenbang Desa Sumber Rejo, Kabupaten Lampung Tengah. *Nusantara Hasana Journal*, 2(1), 45–54. <https://nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/874>
- Nuryanti. (2023). Konflik Pembebasan Lahan dalam Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten di Kendal. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Kebijakan Indonesia*, 2(2), 112–120. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/7826>
- Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Sadar Wisata Nagari Lawang Kecamatan Matur Kabupaten Agam), *Jurnal Pembangunan Nagari*
- Poespitohadi, W., & Fe, F. E. T. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Desa Dalisodo. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, 18(1), 43–50. <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/584/388>
- Rahmaini, I. S. (2022). Keberhasilan Pembangunan Pariwisata Berbasis
- Rahmawati, M. A., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Program Inovasi Desa Budi Daya Jamur Tiram di Desa Jenetaesa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(April), 590–604. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Ridwan, Y. M., Fatmawati, & Rahim, S. (2022). Perencanaan Pembangunan Berbasis Partisipatif Di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(3), 947–960.

- Rudiadi, R., Ilosa, A., & Alsukri, S. (2021). Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa. *Jurnal EL-RİYASAH*, 12(1), 44. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i1.13201>
- Sinaga, G. A. (2023). *Pembangunan Desa di Desa Tanjung Morawa A Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area ARLI GI*.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suindarti, L. R. A., Puspaningrum, A., & Ayu, N. W. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul. *IJD Demos: Jurnal Demokrasi dan Pembangunan Sosial*, 1(2), 67–75. <https://hk-publishing.id/ijd-demos/article/view/480>
- Suryani. (2019). Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan Hasil Pembangunan di Desa Margodadi, Lampung. *Jurnal Masyarakat dan Budaya Indonesia*, 7(1), 35–42. <https://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/584>
- Undang - Undang No 23 Tahun 2004
- Undang - Undang No 25 Tahun 2004
- Undang - Undang No 6 Tahun 2008